

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh korupsi, kualitas institusi, dan kebebasan ekonomi terhadap tingkat inflasi di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Fenomena inflasi di kawasan ini dianalisis menggunakan perspektif *New Institutional Economics* (NIE), yang memandang bahwa stabilitas harga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor moneter, tetapi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan data panel tidak seimbang yang mencakup 44 negara OKI selama periode 2008–2021 dengan total 487 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) yang dipilih berdasarkan serangkaian uji diagnostik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, yang mengonfirmasi bahwa tingginya praktik korupsi memicu inefisiensi ekonomi dan kenaikan harga (*cost-push inflation*). Kualitas institusi terbukti berpengaruh negatif dan signifikan, khususnya melalui indikator *Government Effectiveness* (GE) dan *Voice and Accountability* (VA), yang menunjukkan pentingnya efektivitas birokrasi dan akuntabilitas publik dalam menjaga stabilitas harga. Sebaliknya, kebebasan ekonomi ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Temuan ini menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi di negara-negara OKI memerlukan reformasi kelembagaan yang komprehensif dan pemberantasan korupsi, mengingat liberalisasi ekonomi semata belum efektif tanpa dukungan fondasi institusi yang kuat.

Kata Kunci: Inflasi, Korupsi, Kualitas Institusi, Kebebasan Ekonomi, Negara OKI, *Fixed Effect Model*, *New Institutional Economics*.